

TAJUK RENCANA

Omicron tak Surutkan Libur Nataru

PERBINCANGAN mengenai Omicron masih seru. Apalagi setelah dinyatakan ada orang Indonesia yang terinfeksi. Laporan World Health Organization (WHO) menyebut varian ini telah menyebar ke 106 negara. Bahkan Direktur WHO Eropa Hans Kluge mengatakan, Eropa menghadapi badai Omicron. Mayoritas penderita berusia 20 - 30 tahun dengan gejala batuk, tenggorokan kering dan demam.

Saat ini kita tidak bisa abai apalagi sama sekali tidak waspada terhadap bahaya Omicron. Menurut patologi klinik FK UII, dr Linda Rosita MKes SpPK (K), WHO telah menetapkan Omicron sebagai *variant of concern* (VoC), varian yang mengkhawatirkan. VoC diartikan sebagai varian dari SARS CoV-2 yang menyebabkan peningkatan penularan serta kematian dan bahkan dapat mempengaruhi efektivitas vaksin. (KR, 18/12).

Merasa 'terbelenggu' hampir 2 tahun, ancaman Omicron tidak menyurutkan untuk libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun ini. Apalagi setelah Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Level-3 batal diberlakukan karena kasusnya dinilai melandai serta ada kemungkinan masyarakat di sembilan daerah aglomerasi telah mengalami kekebalan kelompok atau *herd immunity*.

Meski sejatinya, pembatalan tidak menjadi bebas sama sekali. Bahkan aturan yang mengikuti pembatalan PPKM Level-3 ini memuat banyak ketentuan yang diatur dengan sangat riid. Di antaranya tetap menjaga protokol kesehatan (prokes) 5M. Kemudian tidak ada arak-arakan Tahun Baru, menutup alun-alun dan lainnya. Paling utama adalah penguatan Satgas Covid-19 hingga tingkat RT/RW mulai 20 Desember - 2 Januari 2022

Pelaksanaannya? Tidak semua membalikkan tangan. Sebagai contoh, kehadiran pemudik dan

pelancong ke DIY tidak bisa dibendung lagi. PT KAI Daop 6 Yogya yang menjalankan angkutan Nataru sejak 17 Desember hingga hari ke-4, rata-rata per hari menurunkan 11.000 orang. Belum moda lain. Sebaliknya menurut Manajer Humas PT KAI Daop 6 Yogya Supriyanto, per hari pihaknya membarangkatkan sekitar 12.000. Sementara, Ketua PHRI DIY Deddy Pranowo mengungkap dalam libur Nataru ini rata-rata tingkat hunian hotel atau okupansi hotel bintang maupun non-bintang dinilai bagus, mencapai 60,8%. Meski untuk libur Nataru ini ditargetkan okupansi mencapai 80% dengan memanfaatkan 75% kamar hotel. (KR, 23/12). Ini adalah berkah bagi dunia pariwisata beserta sederet ikutan dan pendukungnya, yang sudah 1,5 tahun ini bisa dikatakan mati suri. Omicron tidak menyurutkan pemudik atau pelancong libur Nataru.

Hanya semua harus waspada. Jangan sampai muncul hal yang tidak diinginkan, karena ketidaktegasan dan kesadaran melaksanakannya prokes. Bahkan realita yang harus menyadarkan bahwa bangsa harus saling menjaga dan menurunkan ego masing-masing. Omicron menyadarkan banyak pihak, saat ini belum waktunya berlibur bersama, berkumpul dan bersenang-senang apalagi dalam jumlah besar. Jerman bahkan membuat aturan baru membatasi pertemuan pribadi hingga hanya 10 orang, penutupan klub malam karena rumahsakit kewalahan.

Covid belum berlalu. Bahkan ada ancaman varian baru, Omicron. Sekalipun berkumpul, berseorik dan mengemukakan pendapat dijamin Konstitusi, kita masih harus tertib menjaga dan melaksanakan prokes 5M : mengenakan masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak, menghindari kerumunan serta mengurangi mobilitas. □

Saatnya Investasi di Luar Jawa

PEMERINTAHAN Presiden Joko Widodo berupaya keras memeratakan perekonomian dan meningkatkan kualitas investasi dengan tidak selalu fokus mencari penanaman modal di Pulau Jawa. Berdasarkan catatan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), realisasi investasi sepanjang kuartal III/2021 (Juli-September) mencapai Rp 216,7 triliun. Dari angka tersebut, sekitar 51,9% atau setara dengan Rp 112,5 triliun investasi tersebut berada di luar Pulau Jawa. Sementara sisanya, yakni 48,1% atau setara dengan Rp 104,2 triliun berada di Pulau Jawa. Ini adalah *jump frogging* yang luar biasa dari era rezim sebelum Jokowi.

Sebagaimana data di Kementerian Invesrasi (2020), pada era sebelum Jokowi, rata-rata investasi di luar Jawa kurang dari 30%. Contohnya, periode 2009-2014, yang hanya mencapai nilai 12,7 triliun, investasi menumpuk di pulau Jawa. Padahal disamping pulau Jawa sudah jenuh karena minimnya ketersediaan lahan/lokasi, juga secara teritorial, sudah masuk zona *investment crowded*, sebagaimana yang digambarkan pakar investasi Jepang, Toru Hinagara dalam *Beyond Global Investment* (2020).

Capaian investasi di luar Jawa yang mampu melampaui Pulau Jawa ini sesuai rencana Presiden Jokowi. Capaian investasi ini tak terlepas dari upaya pemerataan infrastruktur ke seluruh daerah di tanah air. Memang pembangunan infrastruktur tidak lagi hanya berpusat di Jawa, cukup merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Kondisi tersebut menggambarkan bahwa pembangunan di Tanah Air sudah mengarah ke Indonesia-sentris. Konsep pembangunan ini tidak akan berhenti. Presiden Jokowi berkomitmen akan terus melanjutkan pembangunan ke seluruh pelosok Nusantara. Sejumlah proyek infrastruktur di luar

Tasroh

Jawa kini memang tengah digenot, seperti Tol Sumatera, pembangunan ibu kota negara baru di Kalimantan Timur, Trans Papua maupun proyek bandara dan pelabuhan baru di banyak tempat. Daya tarik investor menanam modal di Pulau Jawa karena di kawasan tersebut infrastruktur pendukungnya sudah relatif lengkap dan bervariasi.



KR-JOKO SANTOSO

Ketersediaan infrastruktur pendukung ini juga akan memengaruhi biaya logistik. Masalah selanjutnya adalah kesiapan institusi pemerintah daerah luar Jawa yang belum sebaik di Jawa. Ini berkaitan dengan belum mampunya beberapa daerah di luar Jawa mempersiapkan rencana pembangunan jangka menengah yang detail terkait pengembangan investasi di wilayahnya. Masih ditambah pergantian kepala daerah dan kesiapan SDM menjadi tantangan tersendiri.

Menyiapkan SDM

Pemerintah daerah di luar Jawa perlu menyiapkan SDM dan institusi di daerah. Misalnya memberikan infor-

masi yang lengkap dan detail mengenai potensi investasi yang bisa dikembangkan. Tersedianya bank lahan yang mudah diakses dan mempermudah investor mendapatkannya. Jangan seperti kebiasaan buruk di Jawa dimana lahan belum tersedia khusus, sudah sembar mengundang investor manufaktur yang butuh lahan luas. Akibatnya banyak investor yang termakan calo tanah dan jadi ATM birokrat.

Pemerintah daerah juga diimbau untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, khususnya terkait prosedur dan birokrasi perizinan. Hal lainnya yakni jaminan keamanan, baik dari pemda, kepolisian, maupun pihak terkait lainnya. Warga dimohon mendukung investasi di luar Jawa, bukan sekadar untuk pemerataan pembangunan di luar Jawa untuk mengangkut martabat ekonomi warga. Selain memberikan oase bagi peningkatan derajat pekerjaan dan jumlah tenaga kerja yang bisa diserap dengan hadirnya investasi langsung tersebut.

Di atas semua itu, tentunya kolaborasi pemerintah pusat dan daerah menjadi kata kunci bagi pemerataan investasi di Indonesia, khususnya ketika investasi berkembang agresif di luar pulau Jawa. Saatnya investasi di luar Jawa. □

**) Tasroh MPA MSc, Kepala Bidang Litbang di Bappedalitbang Pemkab Banyumas / Tim Pengembangan Investasi Daerah)*

Persyaratan Menulis

Pembaca yang budiman, terimakasih partisipasinya dalam menulis dan mengirimkan artikel untuk SKH *Kedaulatan Rakyat*. Selanjutnya redaksi hanya menerima tulisan lewat email : opinikr@gmail.com dengan panjang tulisan antara 535 - 575 kata, dengan mengisi subjek mengenai isu yang ditulis serta jangan lupa menampilkan fotocopy identitas. Terimakasih.

Masih Seputar Mafia Tanah

Sutaryono

DI PENGHUJUNG tahun 2021 ini, publik disugui wacana dan fakta adanya kejahatan yang hingga saat ini masih sangat meresahkan dan masih menjadi ancaman bagi kita semua, yakni mafia tanah. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mafia dimaknai sebagai perkumpulan rahasia yang bergerak di bidang kejahatan (kriminal). Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A Djailil menyebut, mafia tanah adalah penjahat yang menggunakan tanah sebagai objek kejahatan. Berdasarkan hal di atas, dapat kita pahami bahwa mafia tanah adalah persekongkolan yang melibatkan berbagai pihak untuk melakukan kejahatan dengan tanah sebagai objek utamanya.

Mengapa tanah menjadi sasaran objek kejahatan mafia? Paling tidak terdapat 4 (empat) alasan. (a) tanah merupakan properti yang paling bernilai, di mana nilainya tidak akan pernah turun seperti properti lainnya; (2) tanah mempunyai sifat *scarcity* atau langka. Artinya, ketersediannya terbatas dan hampir semua membutuhkannya; (3) tanah mempunyai sifat *transferability* atau mudah dipindahtangankan; (4) sistem administrasi pertanahan yang belum sepenuhnya memberikan jaminan keamanan bagi pemegang hak atas tanah.

Melibatkan Oknum

Keempat hal di atas memunculkan aktivitas mafia tanah. Biasanya mafia tanah melibatkan oknum pegawai BPN, oknum kepala desa, oknum notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), oknum aparat penegak hukum, serta oknum pada lembaga peradilan. Oknum-oknum tersebut menjalankan operasinya menggunakan cara-cara yang melanggar hukum, yang dilakukan secara terorganisir, rapi dan sistematis. Jelas, praktik mafia tanah dilakukan orang-orang yang memiliki pengetahuan pertanahan sangat memadai dan mempunyai berbagai akses terhadap data dan informasi

(dokumen) pertanahan.

Hingga Oktober 2021, *Business Insight* mencatat adanya sejumlah 732 pengaduan mafia tanah yang penanganannya masih berlangsung. Banyaknya kasus mafia tanah yang terlapor mendorong Kementerian ATR/BPN telah melakukan berbagai upaya serius untuk mengantisipasi dan menangani mafia tanah. Salah satunya bekerjasama dengan kepolisian dan kejaksaan membentuk Satuan Tugas (Satgas) Anti Mafia Tanah pada Tahun 2018.

Untuk memperbaiki sistem administrasi pertanahan guna mengantisipasi adanya praktik mafia tanah Kementerian ATR/BPN telah melakukan upaya-upaya transformasi digital. Ke depan, seluruh data dan informasi pertanahan diolah dan disimpan dalam bentuk digital termasuk sertipikat tanahnya-pun ke depan berupa sertipikat elektronik, yang penerapannya dilakukan secara bertahap (Analisis KR, 08/2).

Antisipasi dan penanganan mafia tanah perlu kolaborasi multipihak. Yakni seluruh jajaran Kementerian ATR/BPN, kepolisian, kejaksaan, catatan sipil, pemerintah desa hingga para pemegang hak atas tanah. Dalam konteks ini upaya antisipasi munculnya mafia tanah lebih dikedepankan.

Desa Lengkap

Antisipasi munculnya mafia tanah dapat diawali dari desa, dengan aktor utama pemegang hak atas tanah dan pemerintah desa. Pemegang hak atas tanah harus memastikan bahwa tanahnya sudah terdaftar dan bersertipikat. Pemerintah desa sebagai organ pemerintah yang langsung ber-

hubungan dengan masyarakat harus memiliki dan/atau dapat mengakses data pertanahan secara lengkap.

Program Desa Lengkap yang menjadi agenda Kementerian ATR/BPN harus segera diwujudkan. Dalam hal ini Desa Lengkap adalah desa yang seluruh bidang-bidang tanah yang berada di wilayah tersebut sudah memenuhi syarat lengkap dan valid baik secara spasial maupun yuridis. Secara spasial seluruh bidang-bidang tanah yang dikuasai subjek hak dan seluruh bidang-bidang tanah yang terbentuk dari unsur geografis (sungai, jalan, gang, fasum, fasos, sempadan, dan lain-lain) telah terpetakan. Secara ringkas dikatakan sebagai Desa Lengkap apabila luas wilayahnya sama dengan total luas bidang-bidang tanahnya. Jika ini terwujud, peluang munculnya mafia tanah dapat diantisipasi. □

**) Dr Sutaryono, Dosen pada Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional dan Prodi Pembangunan Wilayah Fakultas Geografi UGM*

Pojok KR

Indonesia melenggang ke final AFF -- Perlu disiapkan mental untuk menang ***

NU makin terbuka, inklusif dan adaptif -- Siap mewujudkan Indonesia Berkemajuan ***

Rumahtangga miskin di DIY butuh Rp 2 juta/bulan -- Hidup layak memang tidak murah

Berabe

PIKIRAN PEMBACA
Naskah berupa usulan, gagasan, apresiasi atau masalah layanan publik
Naskah dikirim Email atau WA
pikiranpembaca@gmail.com 0895-6394-11000
dilampiri fotocopy/scan KTP, atau langsung ke Redaksi Kedaulatan Rakyat Jalan Margo Utomo 40-42 Yogyakarta 55323. Naskah tidak berisi ujaran kebencian, SARA dan Hoaks. Isi menjadi tanggungjawab penulis.

Makna Nilai Rapor Siswa

MOMEN penerimaan rapor semester tentu ditunggu-tunggu baik oleh siswa maupun para orang tua. Setelah berujung selama satu semester dalam mengerjakan tugas dan ujian penilaian akhir semester (PAS), terima rapor menjadi muara atas semua jerih payah dan keringat yang telah dikeluarkan. Apalagi seperti pada masa pandemi Covid-19 saat ini, peran orang tua lebih besar dalam pendidikan siswa.

Perjuangan siswa dan orang tua akan terdokumentasikan menjadi nilai dalam rapor. Tingkat keberhasilan setiap siswa tentunya berbeda-beda. Ada yang sudah berhasil ditandai dengan nilai yang sangat memuaskan. Namun ada juga siswa yang mungkin belum berhasil ditandai dengan nilai cukup saja atau bahkan kurang.

Nilai rapor sesungguhnya menjadi bahan introspeksi bagi guru, siswa dan orang tua untuk se-

makin mengasah kompetensi yang sudah berhasil baik maupun kurang. Nilai yang kurang bagi guru akan menjadi bahan untuk memperbaiki pembelajaran yang akan datang. Sedangkan bagi siswa dan orang tua berguna untuk semakin meningkatkan intensitas maupun strategi untuk belajar.

Nilai rapor tidak menjadi tolak ukur mutlak untuk menilai keberhasilan siswa. Hal ini dikarenakan nilai rapor tidak mengukur semua aspek kemampuan seorang siswa. Bagi siswa yang belum berhasil tidak berarti siswa yang gagal sehingga tidak perlu berkecil hati. Tetaplah semangat untuk belajar. Sementara siswa yang sudah berhasil, tidak perlu congkak. Tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, jadilah siswa pembelajar sepanjang hayat. □

*Mulyati SPd
Guru SD Negeri Perumnas
Condongcatur, Sleman.*

Kedaulatan Rakyat

Penerus: Dr H Soemadi M Wonohito SH (1985-2008), dr H Gun Nugroho Samawi (2011-2019). **Pemimpin Umum:** M Wirmon Samawi SE MIB. **Pemimpin Redaksi/Penanggung Jawab:** Drs H Octo Lampito MPd. **Wakil Pemimpin Redaksi:** Drs H Ahmad Luthfie MA. Ronny Sugiantoro SPd, SE, MM. **Redaktur Pelaksana:** Primaswolo Sudjono SPT, Joko Budhiarto, Mussenahada. **Manajer Produksi Redaksi:** Ngabdul Wakid. **Redaktur:** Drs Widyo Suprayogi, Dra Hj Fadmi Sustiwi, Dra Prabandari, Isnawan, Benny Kusumawan, Drs H Hudono SH, Drs Swasto Dayanto, Husein Effendi SSI, Hanik Afriati, MN Hassan, Drs Jayadi K Kastari, Subchan Mustafa, Drs Hasto Sutadi, Muhammad Fauzi SSos, Drs Mukti Haryadi, Retno Wulandari SSos, H M Sobirin, Linggar Sumukti, Daryanto Widagdo, Latief Noor Rochmans. **Fotografer:** Effy Widjono Putro, Surya Adi Lesmana. **Grafis:** Joko Santoso SSn, Bagus Wijanarko. **Sekretaris Redaksi:** Dra Hj Supriyatin.

Pemimpin Perusahaan: Fajar Kusumawardhani SE. **Kepala TU Langganan:** Drs Asri Salman, Telp (0274) 565685 (Hunting) **Manajer Iklan:** Agung Susilo SE, Telp (0274) - 565685 (Hunting) Fax: (0274) 555660. E-mail: iklankr@kr.co.id, iklankrkyk2@yahoo.com, iklankrkyk13@gmail.com.

SIUPP (Surat Izin Usaha Penerbitan Pers) No. 127/SK/MENPEN/SIUPP/A.7/1986 tanggal 4 Desember 1990. Anggota SPS. ISSN: 0852-6486. **Penerbit:** PT-BP Kedaulatan Rakyat Yogyakarta, **Terbit Perdana:** Tanggal 27 September 1945. **Perintis:** H Samawi (1913 - 1984) M Wonohito (1912 - 1984). **Alamat Kantor Utama dan Redaksi:** Jalan Margo Utomo 40, Gowongan, Jetis, Yogyakarta, 55232. Fax (0274) - 563125, Telp (0274) - 565685 (Hunting) **Alamat Percetakan:** Jalan Raya Yogya - Solo Km 11 Sleman Yogyakarta 55573, Telp (0274) - 496549 dan (0274) - 496449. Isi di luar tanggungjawab percetakan **Alamat Homepage:** <http://www.kr.co.id> dan www.krjogja.com. **Alamat e-mail:** naskahkr@gmail.com. **Radio:** KR Radio 107.2 FM. **Bank:** Bank BNI - Rekening: 003.0440.854 Cabang Yogyakarta.

Perwakilan dan Biro: **Jakarta:** Jalan Utan Kayu No. 104B, Jakarta Timur 13120, Telp (021) 8563602/Fax (021) 8500529. **Kuasa Direksi:** Ir Ita Indirani. Wakil Kepala Perwakilan: Hariyadi Tata Raharja. **Wartawan:** H Imong Dewanto (Kepala Biro), H Ishaq Zubaedi Raqib, Syaifullah Hadmar, Muchlis Ibrahim, Rini Suryati, Ida Lumongga Ritonga. **Samarang:** Jalan Lampersari No.62, Semarang, Telp (024) 8315792. Kepala Perwakilan: Budiono Isman, Kepala Biro: Isdiyanto Isman SIP. **Banyumas:** Jalan Pr Moh Yamin No. 18, RT 7 RW 03 Karangklesem, Purwokerto Selatan, Telp (0281) 622244. Kepala Perwakilan: Ach Pujiyanto SPd. Kepala Biro: Driyanto. **Klaten:** Jalan Pandanaran Ruko No 2-3, Bendogantungan Klaten, Telp (0272) 322756. Kepala Perwakilan dan Kepala Biro: Sri Warsiti. **Magelang:** Jalan Achmad Yani No 133, Magelang, Telp (0293) 363552. Kepala Perwakilan: Sumiyarsih, Kepala Biro: Drs M Thoha. **Kulonprogo:** Jalan Veteran No 16, Wates, Telp (0274) 774738. Kepala Perwakilan: Suprpto, SPd Kepala Biro: Asrul Sani. **Gunungkidul:** Jalan Sri Tanjung No 4 Purwosari, Wonosari, Telp (0274) 393562. Kepala Perwakilan: Drs Guno Indarjo.